

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *World Health Organization* menjadi peran penting bagi Indonesia dalam menanggulangi epidemik difteri dalam negeri. Wabah difteri yang terjadi di Indonesia sangat parah sehingga diterapkan kondisi KLB dalam negeri, tidak hanya itu, wabah ini juga menjadi perhatian di skala internasional karena wabah difteri di Indonesia merupakan yang terparah kedua setelah India.

Upaya diplomasi bencana Indonesia terhadap WHO membuahkan hasil dengan adanya bantuan dari WHO dalam pengadaan vaksin, pengadaan dan pelatihan tenaga kerja, juga pengawasan serta evaluasi program imunisasi yang ada di Indonesia. Mekanisme diplomasi bencana yang dilakukan berbentuk tidak langsung, karena WHO selalu mengawasi dan mendata permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia khususnya pada difteri, segera setelah kondisi KLB dinyatakan WHO mengambil langkah dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi epidemik difteri di domestik.

Extended Program on Immunization merupakan program imunisasi dalam lingkup global yang dirintis oleh lembaga kesehatan dunia yakni WHO untuk membantu negara-negara dalam menanggulangi penyakit – penyakit yang dapat diobati dengan vaksin. EPI telah diadopsi oleh Indonesia seagai acuan medis dalam melakukan imunisasi semenjak tahun 1990 hingga saat ini, namun program ini saja belum dapat memberikan jawaban bagi permasalahan penyakit difteri yang ada.

Walaupun EPI telah diterapkan di Indonesia, namun dinamika dari penyakit difteri di Indonesia selalu berubah setiap tahunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa

program imunisasi biasa tidak cukup untuk mengobati penderita difteri di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah membuat kebijakan kesehatan serta membentuk strategi untuk mengurangi wabah difteri ini.

Outbreak Response Immunization adalah salah satu program yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan untuk melakukan imunisasi tambahan kepada masyarakat demi menaikkan tingkat kekebalan tubuh pada setiap individu. Program ini dibuat sebagai program penyokong dari EPI yang diharapkan dapat menetralkan hingga menstabilkan epidemik difteri yang terjadi. Pada 2017 EPI dilakukan di tiga Provinsi dengan tingkat persentase cakupan imunisasi yaitu Provinsi Banten dengan 55.33 %, Jawa Barat dengan 41.15%, dan Jakarta dengan 61.75%. Dari hasil yang didapatkan, program ini belum cukup dalam mengobati serta menyelesaikan problema difteri yang ada di Indonesia

South East Asia Region Vaccine Action Plan merupakan program terobosan baru dari WHO untuk mencapai tahap kesehatan masyarakat di setiap negara dengan tingkat 90-95% terkait dengan penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. Program ini merupakan acuan kerja yang dibentuk WHO dalam meningkatkan layanan kesehatan dari setiap negara di Asia Tenggara termasuk dengan bantuan-bantuan yang diberikan untuk meningkatkan taraf kesehatan domestik. Sebagai acuan kerja, perlu adanya implementasi secara penuh dari pemerintah negara agar dapat mencapai hasil yang optimal serta maksimal dari program SEARVAP ini.

Menurut penulis sebenarnya strategi imunisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dan WHO sudah cukup, mengetahui bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan pemberian vaksin DPT. Namun, terlalu banyak faktor-faktor yang menyebabkan epidemik ini di Indonesia seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi dari imunisasi, informasi mengenai bahayanya difteri, adanya *immunity gap* dalam masyarakat,

kondisi gizi rendah bagi sebagian kalangan masyarakat dan juga akses yang sulit ke pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga perlu mempertahankan serta memberlanjtkan program-program imunisasi dari WHO yaitu EPI, ORI, dan SEARVAP untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di domestiknya. Hal tersebut dapat terjadi jika pemerintah berkomitmen secara penuh dan melibatkan setiap kalangan di masyarakat untuk bekerjasama dalam memberantas epidemik dari penyakit yang ada. Serta juga terus mengkaji kebijakan agar epidemik ini tidak kembali terjadi penyebarluasan.

WHO memiliki peran penting dalam mengatasi wabah difteri di Indonesia. Dari segi pengawasan, WHO berhak untuk mengevaluasi strategi dari Pemerintah Indonesia serta program-program kesehatan yang ada terkait dengan penyakit difteri dan menyusun strategi sendiri yang sesuai dengan dinamika di Indonesia sebagai saran terhadap pemerintahan terkait untuk menanggulangi epidemik penyakit ini. Bantuan-bantuan yang diberikan WHO juga berdampak besar dalam meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia. Bantuan yang diberikan akan dialokasikan pertama kali kepada DEPKES yang kemudian akan mendistribusikan kepada layanan kesehatan yang membutuhkan. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan WHO diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan difteri yang ada.

VI.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan adalah pertama, pemerintah menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan WHO terkait dengan epidemik difteri ini sehingga dapat menghasilkan sinergisitas dan efektifitas yang lebih baik lagi bagi kedua belah pihak dalam menanggulangi epidemik difteri yang ada.

Kedua, WHO dan Pemerintah Indonesia harus bersama-sama mengoptimalkan program imunisasi yang ada dengan terus mengembangkan kebijakan kesehatan serta melakukan penelitian laboratorium mengenai tingkat

keefektivitasan vaksin dan juga ketahanan bakteri difteri terhadap vaksin agar hasil imunisasi dapat maksimal.

Ketiga, WHO memberikan bantuan lebih kepada Indonesia dengan mengetahui Indonesia sebagai negara dengan kasus difteri terparah di dunia kedua setelah India.

Keempat, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang tergabung di WHO untuk mengkaji dan membuat inovasi baru dalam meningkatkan program imunisasi yang ada.

Kelima, WHO perlu mengadakan pengawasan lebih terhadap kasus difteri yang ada serta mengevaluasi program imunisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Keenam, Pemerintah Indonesia dan WHO lebih melakukan pendekatan berupa advokasi terhadap masyarakat untuk penyelarasan informasi terkait dengan bahaya dari penyakit difteri dan program-program kesehatan yang ada.